

INTISARI

Besarnya pengaruh pelaporan dana kampanye yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam mewujudkan pemilu yang *free and fair* dan kemajuan demokrasi secara umum seringkali belum sepenuhnya disadari oleh banyak pihak. Menegakkan peraturan dana kampanye dan mewujudkan *inform voters* merupakan arti penting pelaporan dana kampanye bagi pemilu. Bagi demokrasi, pelaporan dana kampanye dapat memastikan terwujudnya prinsip *one man one vote one value*, mendorong keberanian rakyat untuk bersuara dalam politik, dan mencegah korupsi politik. Untuk mewujudkannya, penulis melihat perlunya sebuah desain pelaporan dana kampanye yang dapat lebih mewujudkan terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan kampanye yang selama terutama dalam perhelatan pilkada masih dirasa memiliki beberapa celah yang perlu diperbaiki.

Tesis ini mencoba memberikan tawaran solusi berupa desain sistem pelaporan dana kampanye yang dapat mengatasi permasalahan rendahnya akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye khususnya dalam pilkada di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka analisis dimensi transparansi dari The National Institute on Money in State Politics (Institute) dan Dardias, serta dimensi akuntabilitas dari Ocampo, penulis menjelaskan pelaksanaan pelaporan dana kampanye dengan mengambil studi kasus pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora 2015.

Tesis ini menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye masih berada pada derajat transparansi yang manipulatif dan derajat akuntabilitas yang teknokratis. Penulis berargumen bahwa desain sistem pelaporan dana kampanye yang dapat menjangkau seluruh aktor dan mampu memberikan insentif bagi aktor yang terlibat didalamnya merupakan hal penting dalam mewujudkan pelaporan dana kampanye yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci : Dana kampanye, Pilkada.

ABSTRACT

The magnitude of the effect of campaign fund reporting carried out transparently and accountably in realizing free and fair elections and democratic progress in general is often not fully realized by many parties. Enforcing campaign finance regulations and realizing inform voters is an important means of reporting campaign funds for elections. For democracy, campaign finance reporting can ensure the realization of the principle of one man one vote one value, encourage the courage of the people to speak out in politics, and prevent political corruption. To make this happen, the author sees the need for a campaign finance reporting design that can further realize the implementation of the principles of transparency and accountability in campaign finance which during the pilkada event is still felt to have several gaps that need to be improved.

This thesis tries to offer a solution in the form of a campaign finance reporting system design that can overcome the problems of low accountability and transparency of campaign finance reporting, especially in the elections in Indonesia. Using a qualitative approach and an analytical framework for the transparency dimensions of the National Institute on Money in State Politics (Institute) and Dardias, as well as the accountability dimension of Ocampo, the authors explain the implementation of campaign finance reporting by taking case study on the election of the 2015 Blora Regent and Deputy Regent.

This thesis finds that transparency and accountability in campaign finance reporting are still in a manipulative degree of transparency and technocratic degree of accountability. The author argues that the design of a campaign fund reporting system that can reach all actors and be able to provide incentives for all actors involved in it is important in realizing more transparent and accountable campaign finance reporting.

Keyword : Campaign finance disclosure, local election.